

Perkembangan Peradaban Islam Indonesia Pasca Reformasi

Hisyal Fatahillah¹; Ilma Ilaina² ;
Nasikhin³; Fihris⁴

Abstrak

Tujuan tulisan ini dibuat adalah untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana kondisi dan perkembangan masyarakat Islam pada era pasca reformasi. Metode yang digunakan yaitu dengan metode normatif, dimana bahan yang digunakan berasal dari literatur dan suber pustaka lainnya, dan penelitian yang dilakukan menghasilkan pembahasan berupa; 1) Sistem pemerintahan yang berlaku, 2) Siapa saja tokoh yang berpengaruh, 3) Bagaimana kondisi sosial budaya pada waktu itu, 4) Tantangan apa saja yang dihadapi, dan 5) Strategidakwah apa yang dilakukan. Kajian ini penting untuk menabahnya literatur dan pengetahuan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa pasca reformasi.

Kata Kunci: Islam; Era Reformasi; Peradaban Islam.

Abstract

The purpose of this paper is to analyze and find out how the condition and development of Islamic society in the post-reform era are. The method used is the normative method, where the material used comes from literature and other sub-literature, and the research carried out produces discussions in the form of; 1) The prevailing system of government, 2) Who were the influential figures, 3) What were the socio-cultural conditions at that time, 4) What challenges were faced, and 5) What proselytizing strategies were carried out. This study is important to change the literature and knowledge about the development of Islamic civilization in the post-reform period.

Keywords: Islam Civilization; The Era Of Reformation.

A. PENDAHULUAN

Masa reformasi cukup menarik untuk dibahas, apalagi tentang peradaban Islam pada masa itu, yang dimana Islam sangat melekat dengan Indonesia, Islam sendiri bermula di Indonesia sekitar abad ke-7 masehi, yang pada saat itu, Indonesia masih dikenal dengan nusantara dan didominasi oleh kerajaan- kerajaan. Peradaban Islam di Indonesia memiliki cerita yang cukup panjang, yang dimulai dari awal masuknya Islam di Indonesia, masa kerajaan, masa kolonialisme, masa kemerdekaan dan sampai detik ini, yang dimana setiap masa mempunyai hal seru tersendiri. Dan kali ini kami akan membahas keadaan Islam pada masa pasca reformasi.

Reformasi di Indonesia diawali atas jatuhnya kekuasaan presiden Soeharto, yang kemudian kepemimpinan tertinggi diberikan kepada BJ Habibie yang pada saat itu menjadi wakil presiden. Jika meminjam bahasanya Abdurrahman Wahid, masa reformasi

¹ UIN Walisongo, hisyal88@gmail.com

² UIN Walisongo, ilmailaina10@gmail.com

³ UIN Walisongo, nasikhin@walisongo.ac.id

⁴ UIN Walisongo, fihris@walisongo.ac.id

itu seperti sebuah kran air yang jika dibuka akan berhamburan kemana-mana. Yang diamana maksudnya adalah dibukanya pintu kebebasan setelah ditutup paksa selama kurang lebih 32 tahun. Tumbangnya presiden Soeharto digantikan oleh Habibie tentu membuka lebar akan kebebasan setiap individu pada setiap level, mulai dari kebebasan bersuara, berpolitik, pilihan fahamserta keyakinan, dan lain-lain. (Amin Maghfuri, 2020)

Dalam artikel ini, penulis akan menyajikan sebuah uraian tentang keadaan Islam di Indonesia pada era pasca reformasi, mulai dari apa sistem pemerintah yang berlaku, siapa saja tokoh yang muncul dan berpengaruh pada masa itu, seperti apa keadaan sosial dan budaya yang berkembang dimasyarakat, apa saja tantangan yang diterima umat Islam pada masa itu, dan bagaimana solusi serta strateginya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana kondisi dan kultur Islam pada masa pasca terjadinya reformasi di Indonesia. Teknik penulisan yang digunakan yaitu metode normatif, dimana bahan yang digunakan berasal dari literatur, media online dan suber perpustakaan lainnya..

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemerintahan

Sebelum BJ Habibie menjabat sebagai kepala negara, Indonesia sudah beberapa kali bergonta-ganti sistem pemerintahan, mulai dari presidensial, Republik Indonesia Serikat, parlementer, UUDS, hingga kembali kepada UUD 1945 setelah beberapa kali diamandemen. Pada masa kekuasaan rezim Soeharto, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang berdasar pada UUD 1945 dan Pancasila, namun sayangnya pemerintah dianggap terlalu otoriter, mengatur pers, membungkam kebebasan berbicara, dan membatasi pergerakan rakyat. Sampai akhirnya pada tahun 1998 saat terjadi krisis moneter, seluruh elemen masyarakat bergerak dan menuntut reformasi dilakukan.

Jatuhnya rezim ini membawa angin segar bagi masyarakat Indonesia untuk membangun kembali iklim demokrasi baru yang telah lama mati, namun dengan keadaan yang belum stabil dan planning yang belum jelas, usaha usaha yang dilakukan menjadi kurang maksimal. Pada periode singkatnya menjabat, presiden BJ Habibie tidak merubah sistem pemerintahan negara, yakni tetap menggunakan sistem presidensial yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, namun beliau mengubah kebijakan-kebijakan lama yang mengekang rakyat, seperti dimulainya kebebasan pers, pemberian izin pendirian partai politik dan serikat buruh, pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode, serta desentralisasi kekuasaan ke daerah (M Yudha Prasetya, 2016), sistem dan kebijakan tersebut bahkan masih dijalankan hingga sampai saat ini.

B. Tokoh yang Berpengaruh

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa reformasi sangat memberikan perubahan yang besar. Salah satunya pada dunia perpolitikan negara, kebijakan tentang izin pendirian partai politik memunculkan banyak tokoh-tokoh baru. Jauh sebelum itu, pada hari-hari terakhir masa jabatan presiden Soeharto, ada fenomena unik yang terjadi di istana negara, yakni pertemuan para tokoh masyarakat dan agama yang diundang presiden Soeharto untuk dimintai pendapat terkait kondisi bangsa yang sudah amat genting akibat krisis multidimensi yang terjadi. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah ketua PBNU Abdurrahman Wahid (Gus Dur), budayawan

Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), direktur yayasan Paramadina Nurcholis Madjid (Cak Nur) Ketua MUI Alie Yafie, Prof Malik Malik Fadjarb dari Muhammadiyah, Guru besar hukum tata negara dari UI Yusril Ihza Mahendra, KH Cholill Baidowi dari Muslimin Indonesia, Sumarsonodari Muhammadiyah, Achmad Bagdja dan Ma'ruf Amin dari Nahdatul Ulama (Sianturi, 2020). Tokoh-tokoh tersebutlah yang berpengaruh pada pengunduran diri Soeharto dan awal dimulainya reformasi.

Selanjutnya reformasi juga melahirkan tokoh-tokoh yang berpengaruh bagi Indonesia kedepannya, mereka juga orang-orang yang turut memprakarsai reformasi, dimana mereka melakukan pertemuan ciganur yang dicetuskan Gus Dur. Mereka yang menghadiri pertemuan tersebut ialah :

1. KH. Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid atau yang biasa disebut Gus Dur adalah ketua Nahdatul Ulama pada saat itu, beliau juga merupakan penggagas partai PKB. Pada masa pemilu pertama di awal orde reformasi, Gus Dur dijagokan menjadi calon presiden RI oleh tokoh-tokoh reformasi dari PKB dan disokong penuh oleh kelompok Poros Tengah. Akhirnya, Gus Dur ditunjuk sebagai Presiden RI menggantikan BJ Habibie, sedangkan Megawati diangkat menjadi wakil presiden mendampingi Gus Dur.

2. Sri Sultan Hamengkubuwono X

Beliau merupakan Raja Yogyakarta yang memiliki peran penting mempersatukan bangsa ini agar tetap bersatu, karena sejak krisis moneter, Indonesia mengalami ancaman disintegrasi. Apalagi, sejak Timor Timur lepas dari pangkuan ibu pertiwi, memicu timbulnya separatisme di beberapa tempat di Indonesia. Banyak yang tidak tahu, bahwa beliau juga merupakan bagian dari tokoh-tokoh reformasi. Pada masa menjelang reformasi, Sri Sultan sering turun ke jalan menenangkan demonstran agar tak bertindak anarkis, terutama di Yogyakarta. Pada waktu itu, hari-hari menjelang Soeharto turun terjadi aksi huru-hara di Jakarta, Solo, dan Banjarmasin. Sebagai salah satu dari tokoh-tokoh reformasi, beliau membawa dampak baik bagi masyarakat Yogyakarta.

3. Megawati Soekarno Putri

Megawati mendirikan partai baru yang diberi nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai partai tandingan PDI. Sejak itu, Megawati berjarak dengan rezim Soeharto. Pada era reformasi, pemeran dalam tokoh-tokoh reformasi ini memiliki peran yang cukup penting. Beliau merancang kembali nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi. Pada pemilu legislatif, partai yang didirikan Megawati memperoleh banyak suara, bahkan mengalahkan Golkar. Megawati pun ditunjuk sebagai wakil presiden mendampingi Gus Dur. Dia didukung oleh banyak tokoh-tokoh reformasi lainnya.

4. Amien Rais

Amien Rais (M. Sauki, 2018) merupakan salah satu dari tokoh-tokoh reformasi yang hadir dari dunia kampus. Amien Rais juga punya andil dalam menggulingkan rezim Soeharto. Beliau merupakan sosok pencetus berdirinya kelompok Poros Tengah yang dideklarasikan di Ciganjur, tempat kediaman Gus Dur. Awal-awal menjelang rezim orde baru runtuh, Amien Rais selalu turun ke jalan bergabung dengan demonstran mahasiswa. Orasi-orasi yang dilontarkan Amien Rais begitu cerdas. Beliau menawarkan perubahan demokrasi Indonesia yang lebih modern Saat banyak partai bermunculan, Amien Rais juga mendeklarasikan partainya, yakni Partai Amanat Nasional. Pada era reformasi, PAN merupakan salah satu partai papan atas. Amien Rais juga sempat menjabat ketua MPR.

C. Kondisi Sosial Budaya

Reformasi merubah segalanya, setelah reformasi dilakukan, banyak sekali

peristiwa-peristiwa dan perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat. Salah satu peristiwa yang terbesar terjadi pada tahun 1999, yaitu referendum rakyat Timor-Timor, yang membuahkan hasil pemisahan diri dari tubuh NKRI. Pada awal reformasi, kehidupan sosial masyarakat sempat diwarnai konflik yang bersifat etnis dan agama, misalnya seperti konflik sampit antara suku Madura dan Dayak pada tahun 2001 dan kerusuhan yang bernuansa agama di Poso Sulawesi, namun itu semua dapat diatasi oleh pemerintah, seperti yang dilakukan Abdurrahman Wahid dengan membebaskan perayaan imlek bagi etnis Tionghoa dan masyarakat Papua dapat mengibarkan bintang kejora dengan syarat tidak boleh melebihi Sang Saka Merah Putih.

Bagi umat Islam Indonesia, reformasi juga berdampak besar. Islam di Indonesia mengalami perkembangan pesat dan dibuktikan dengan jumlah penduduk Muslim yang mencapai +88%. Hal ini tidak terlepas dari penyebaran Islam ke seluruh wilayah tanah air, dari kota-kota besar, sampai ke daerah-daerah terpencil (Sauki, 2018). Selain itu, reformasi juga memunculkan gerakan-gerakan sosial masyarakat yang menuntut pemberlakuan syariat Islam pada setiap bentuk tatanan. Dalam konteks ini, maka bermunculan organisasi seperti Forum Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad, Forum Komunikasi Ahli Sunnah Waljamaah (FKSW), Hizbut Tahrir, dan lainnya. Hal ini menjadi bukti yang jelas bahwa Islam semakin mengalami perkembangan dengan segala problematikanya (Fajar, A. Malik, 1998).

Pada intinya, akibat reformasi terjadi perubahan sosial budaya yang cukup besar di tengah masyarakat kala itu, perubahan tersebut salah satunya ialah mulai beraninya rakyat untuk berkumpul, menyuarakan pendapat, membentuk organisasi dan juga lebih bebasnya dalam menjalankan ibadah agama, walaupun pada awalnya sempat terjadi konflik antar etnis dan agama, namun itu semua bisa memudar seiring berjalannya waktu, dan itu juga merupakan proses pembelajaran dan pendewasaan masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Tantangan

1. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pendidikan Islam saat ini sedang ditantang kontribusinya terhadap pembentukan peradaban dan budaya modern yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Pada dimensi ini, pendidikan Islam mengalami kemunduran fungsi (degradasi fungsional) karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada aspek moral spiritual. Terdapat banyak pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan Islam tidak terlalu fokus memprioritaskan aspek yang bersifat praktis dan pragmatis, seperti penguasaan teknologi. Akibatnya, pendidikan Islam tidak mampu bersaing pada level kebudayaan di tingkat global. Secara makro kondisi pendidikan Islam saat ini sudah ketinggalan zaman. Tertinggal karena kalah berpacu dengan perkembangan dan perubahan sosial budaya. Tertinggal sebab alumni yang dihasilkan kalah bersaing dalam penguasaan ipteks. Ipteks dengan beragam kemajuan yang dibawanya bersifat fasilitatif terhadap kehidupan manusia. Artinya, ipteks memberi fasilitas kemudahan bagi manusia, tetapi juga dapat merugikan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam memandang perkembangan ipteks sebagai tantangan yang harus dihadapi dan dikuasai, sehingga generasi muslim tidak tertinggal oleh kebudayaan yang berkembang. Pada konteks ini ada dua hal yang penting untuk dipikirkan, yaitu :

- (1) bagaimana supaya perkembangan ipteks tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam;
- (2) bagaimana pendidikan Islam dapat berkontribusi bagi kemajuan ipteks di masa depan (Indra, Hasbi, 2005).

2. Demokratisasi

Demokratisasi merupakan isu lain yang mempengaruhi pendidikan Islam Indonesia. Dede Rosyada (2004) menjelaskan, bahwa tuntutan demokratisasi pada awalnya ditujukan pada sistem politik negara sebagai antitesis terhadap sistem politik yang otoriter. Selanjutnya perkembangan tuntutan ini mengarah kepada sistem pengelolaan berbagai bidang termasuk bidang pendidikan.

Kehidupan demokrasi adalah kehidupan yang menghargai akan potensi individu. Artinya, bahwa setiap bentuk homogenisasi masyarakat adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip hidup demokrasi. Sehingga, menurut Tilaar (1998), dalam bidang pendidikan semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, juga memiliki kewajiban yang sama dalam membangun pendidikan nasional yang berkualitas (Mastuhu, 1999). Demokratisasi pendidikan membuka ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam pendidikan, walaupun di satu sisi ini berpotensi melahirkan komersialisasi pendidikan, terutama oleh kelompok pengusaha pendidikan yang berusaha meraup keuntungan melalui bisnis pendidikan. Demokratisasi pendidikan Islam menghendaki sistem pendidikan yang bersifat sentralistik, seragam, dan dependen, untuk beralih mengembangkan sistem pendidikan yang lebih otonom, beragam, dan independen.

3. Dekadensi moral

Revolusi teknologi berakibat pada pergeseran nilai dan norma budaya. Pada lazimnya, nilai-nilai budaya dari pihak yang lebih dominan dalam penguasaan ipteks akan cenderung berposisi dominan pula dalam interaksi kultural yang terjadi. Dalam konteks ini, Hasbi Indra (2005: 72) menjelaskan bahwa budaya Barat telah memperlihatkan superioritasnya terhadap budaya Islam (Achmad Slamet, Aida Farichatul Laila, 2018). Produk teknologi seperti TV, parabola, telepon, VCD, DVD, internet, dan lain-lain dapat membuka hubungan dengan dunia luar sehingga wawasan masyarakat terbuka. Namun, lewat media tersebut dapat pula disaksikan pornografi, film-film, sinetron yang menawarkan gaya hidup bebas dan juga kekerasan, yang secara moral bertentangan dengan nilai Islam.

E. Strategi Dakwah

Reformasi juga menciptakan perubahan sosial dimasyarakat, berbagai tantangan dan problematika terus muncul. Islam juga terkena dampaknya, maka dari itu, diperlukan strategi-stretegi dalam mendakwahkan agama untuk menghadapi tantangan dan problematika yang ada, serta agar mampu bersaing bahkan mendominasi perkembangan zaman yang semakin beraneka ragam ini, supaya umat Islam Indonesia tetap berpegang teguh pada ajaran agama dan tidak lupa dengan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Untuk pembahasan strategi dakwah kali ini, penulis mengambil contoh dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, berikut uarainnya:

a. Strategi dakwah Nahdatul ulama

Nahdatul Ulama merupakan organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Seperti yang kita ketahi salah satu cara dakwah NU adalah dengan membangun pondok pesantren sebagai tempat menuntut ilmu agama, sudah banyak pesantren yang tersebar diseluruh nusantara. Bukan hanya itu, NU juga memanfaatkan media msssa online, media massa online atau internet merupakan media dan sumber informasi yang paling canggih saat ini, sebab teknologi ini menawarkan berbagai kemudahan, kecepatan, ketepatan akses dan kemampuan menyediakan berbagai kebutuhan informasi setiap orang kapan saja, dimana sajadan pada tingkat apa saja (Slamet, 2014). Contohnya adalah website NU.Online (<https://nu.or.id>) , instrgram nuonline_id, dan yang lainnya.

Dalam menghadapi tantangan pluralisme, pada tanggal 7 September 2004,

berdiri The Wahid Institute (WI). Lembaga ini merupakan lembaga yang memiliki visi untuk mewujudkan prinsip dan cita-cita intelektual Abdurrahman Wahid dalam membangun pemikiran Islam moderat yang mendorong terciptanya demokrasi, multikulturalisme, dan toleransi di kalangan kaum muslim di Indonesia dan seluruh dunia. Adapun misi dari The Wahid Institute adalah sebagai berikut: mengembangkan, merawat dan menyebarluaskan nilai-nilai Islam yang damai dan toleran, mengembangkan dialog antara budaya lokal dan internasional demi memperluas harmoni Islam dengan berbagai kebudayaan budaya dan agama di dunia, mendorong beragam inisiatif untuk memperkuat masyarakat sipil dan tata kelola pemerintah yang baik di Indonesia dalam penguatan demokrasi, mempromosikan partisipasi aktif dari beragam kelompok agama dalam membangun dialog kebudayaan dan dialog perdamaian, dan mengembangkan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Untuk menyampaikan gagasan-gagasan pluralisme, demokrasi, dan sebagainya, The Wahid Institute juga menerbitkan berbagai macam buku sebagai media untuk mentransformasikan gagasan-gagasan pluralisme ala Gus Dur kepada seluruh masyarakat (Haedar Nashir, 2018).

b. Strategi Dakwah Muhammadiyah

Strategi dakwah Muhammadiyah lebih kearah bidang pendidikan dan kesehatan. Muhammadiyah banyak membangun sarana pendidikan dari mulai pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, serta banyak membangun rumah sakit sebagai penunjang kesehatan masyarakat. Seperti halnya NU, Muhammadiyah juga berperan aktif dalam penggunaan media massa online sebagai sarana dakwah, seperti website muhammadiyah.or.id dan instagram lensamu. Penyebaran Gagasan Islam Berkemajuan oleh Muhammadiyah juga merupakan upaya untuk mengenalkan Islam yang lebih modern dan menjawab tantangan zaman. Dakwah ini dilakukan melalui dua strategi besar yang strategi pencerahan dan strategi dakwah bil amal. Strategi dakwah pencerahan dan strategi dakwah bil amal (dakwah transformative) merupakan dua strategi yang dapat dilihat sebagai sebuah strategi kebudayaan Muhammadiyah (Cora Elly Novianti, 2013)

E. KESIMPULAN

Sistem pemerintahan pada pasca reformasi sampai sekarang masih sama yaitu sistem pemerintahan presidensial yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh presiden sekaligus berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Indonesia juga menganut sistem politik demokrasi, dimana sistem pemerintahan diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tokoh yang berpengaruh pasca reformasi adalah mereka yang juga ikut andil pada awal terbentuknya reformasi, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya duduk dikursi pemerintahan dan menjadi petinggi negara, tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah KH. Abdurrahman Wahid, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Megawati Soekarno Putri, dan Amien Rais. Selain itu ada beberapa alumni aktivis 98 yang sekarang duduk dikursi pemerintahan. Kondisi sosial dan budaya pada awal reformasi, sempat diwarnai dengan konflik yang berbau etnis dan agama. Bagi umat Islam sendiri, karena kebebasan berkumpul dan menyuarakan pendapat sudah diperbolehkan, banyak bermunculan organisasi kemasyarakatan yang benuansa islami, walaupun mereka dianggap terlalu keras dalam menerapkan syariat Islam di negara yang maemuk ini, namun terlepas dari itu, setelah adanya reformasi, perkembangan Islam dinilai cukup sangat pesat. Ada tiga tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu kemajuan iptek, demokratisasi, dan dekadensi moral. Ketiga tantangan tersebut membawa pengaruh besar dalam semua bidang

kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Perkembangan dan kemajuan iptek prinsipnya berpotensi melemahkan daya mental spiritual. Permasalahan baru yang harus segera dipecahkan oleh pendidikan Islam adalah dehumanisasi pendidikan dan netralisasi iptek dari nilai-nilai agama. Pendidikan Islam ditantang untuk membuktikan kemampuannya dalam penguasaan iptek, sekaligus kesanggupannya dalam mengendalikan dampak negatif dari iptek. Strategi dakwah yang dilakukan Nahdatul Ulama selain dengan bidang pendidikan pada pesantren, juga mendirikan lembaga dakwah, contohnya The Wahid Institute (WI) yang berdakwah pada tantangan pluralisme di Indonesia. Sedangkan Muhammadiyah hampir sama yaitu bergerak pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, selain itu Muhammadiyah mengusung gagasan Islam berkembang. Dan pada era milenial ini, keduanya turut serta dalam penggunaan media online sebagai sarana dakwah.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Ach Syaiful. *Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi* (Al Iman : Jurnal Keislaman dan Masyarakat 2018)
- Amin Maghfuri, *Analisis Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Orde Reformasi* (Tadbir : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2020)
- M.Sauki, *Peradaban Islam di Indonesia Era Reformasi* (Tasamuh Jurnal Studi Islam, 2018)
- Fajar, A. Malik. 1998. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan.
- Indra, Hasbi. 2005. *Pendidikan Islam Melawan Globalisasi*. Cet. II; Jakarta: Rida Mulia.
- Mastuhu, 1999. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Cet. 2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Achmad Slamet, Aida Farichatul Laila, *Strategi Dakwah Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Jepara Dalam Perspektif Pemanfaatan Media Massa*, (Jurnal An-Nida, 2018)
- Haedar Nashir, dalam Alpha Amirrahman, Andar Nubowo dan Azzaki Khoiruddin, *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia*, Mizan.
- Slamet, Nahdatul Ulama Dan Pluralisme: *Studi Pada Strategi Dakwah Pluralisme NU di Era Reformasi* (KOMUNIKA 2014)
- Muhammad Rahul Amin. *Gerakan Sosial Muhammadiyah Di Era Reformasi* (JISI 2020)
- Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*, (Prenada Media 2007)
- Cora Elly Novianti, *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan*, (Jurnal Konstitusi 2013)
- Dwi Wahyono Hadi, Gayung Kesuma, *Propaganda Orde Baru 1966-1980* (Media Varleden 2012)
- Oriksal Eka Putra, *Hubungan Islam Dan Politik Masa Orde Baru* (Jurnal Dakwah : Media Komunikasi Dan Dakwah 2008)
- Elli Karmeli, *Krisis Ekonomi Indonesia*, (Journal of Indonesian Applied Economics 2008)
- Suheri Harahap, *Konflik Etnis Dan Agama Di Indonesia* (JISA 2018)
- Junaedi, M., Nasikhin, N., & Hasanah, S. (2022). *Issues in the Implementing of*

- Online Learning in Islamic Higher Education During the Covid-19 Pandemic.* Ta'dib, 25(1) Junaedi, Mahfud, Nasikhin Nasikhin, and Silviatul Hasanah. (2022). "Issues in the Implementing of Online Learning in Islamic Higher Education During the Covid-19 Pandemic." Ta'dib 25.1.
- Nasikhin, N., & Raaharjo, R. (2022). *Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan.* IslamicReview: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 11(1)
- Nasikhin, N., & Shodiq, S. (2021). *DIFFERENT PERSPECTIVE OF RELIGIOUS EDUCATION IN ISLAMIC THEOLOGY AND WEST THEOLOGY* Jurnal AlFatih, 4(2)
- Nasikhin, N., Ismutik, I., & Albab, U. (2022). *PHILOSOPHY OF ISLAMIC SCIENCE IN AL-FARABI'S PERSPECTIVE.* RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam, 3(1)
- Saefudin, Ahmad, et al. "Active Non-Violence Education in Rural Culture." Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman 33.2 (2022)
- Nurhalisa, Siti, et al. "The Urgence Of Islamic Philosophy For Education In Elementary School." JASNA: Journal For Aswaja Studies 2.2 (2022)



Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam
Volume 2, Nomor 1, April 2023, 1 - 12
E-ISSN: 2830-182X
<https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jgt>



Jurnal Generasi Tarbiyah : Jurnal Pendidikan Islam
Volume 2, Nomor 1, April 2023